



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury



KANWIL DJPb
PERBENDAHARAAN
PROV. KALIMANTAN SELATAN



TEBAR

Treasury
Banua
Reviu

S , r, , S



SCAN ME

Buletin Tebar Vol IV/No.2/2025

Kata Pengantar



Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buletin Tebar Vol IV/No.2/2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buletin ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* eskternal maupun internal yang antara lain berkaitan dengan kinerja APBN dan APBD Regional Kalimantan Selatan, kinerja penyaluran KUR dan UMi, opini pegawai, serta lensa peristiwa penting.

Dengan adanya Buletin ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus edukasi bagi para pembaca, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta transparansi pengelolaan keuangan kepada satuan kerja, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Selatan

Ditandatangani secara elektronik
Syafriadi

Daftar Isi

Kata Pengantar

ii

iii

Daftar Isi

Kondisi Ekonomi
Kalimantan Selatan

1

2

Kinerja APBN dan APBD
Regional Kalsel

Kinerja Penyaluran
KUR dan UMi

4

6

Local Issue

Opini

7

9

Lensa Peristiwa
Penting

Penanggung Jawab: Syafriadi

Pengarah: Chandra Julihandono Sj

Pemimpin Redaksi: Achmad Fajar Setiawan

Editor: Shasza Yemima P. A., Ulya Rusita

Desain dan Tata Letak: Nafisha Aulia A.

Kontributor: Chandra Julihandono Sj



Kondisi Ekonomi Kalimantan Selatan s.d. 31 Maret 2025

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan I 2025 (y-on-y)



Perekonomian Kalimantan Selatan Triwulan I 2025 tumbuh sebesar **4,81 persen (y-on-y)**, dan berkontribusi sebesar 15,31 persen terhadap ekonomi Pulau Kalimantan. Perekonomian Kalimantan Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I 2025 mencapai **Rp70,86 triliun** dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai **Rp38,24 triliun**.

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I 2025 masih didominasi oleh **Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,33 persen**; Industri Pengolahan sebesar 12,10 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,33 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai **50,76 persen**.

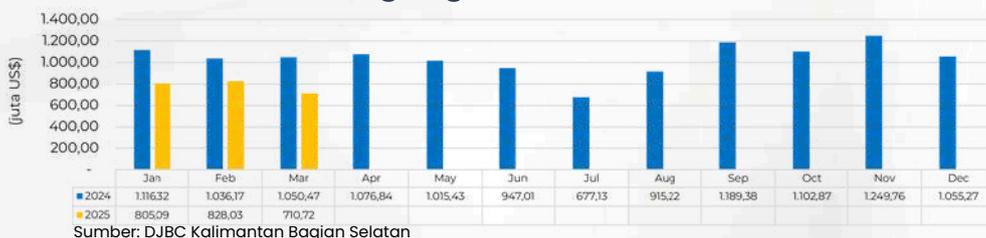
Inflasi Kalimantan Selatan

Pada **Maret 2025**, inflasi Kalsel **1,59% mtm**, berada di bawah inflasi nasional sebesar **1,65% mtm**. Sementara secara *year on year*, Kalimantan Selatan tercatat mengalami inflasi sebesar **1,20 persen (yoy)** dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar **107,60**.



Beberapa komoditas penyumbang inflasi (*mtm*) di Kalimantan Selatan antara lain tarif listrik, emas perhiasan, bawang merah, cabai rawit, dan jagung manis.

Neraca Perdagangan Kalimantan Selatan



Pada **Maret 2025 surplus neraca perdagangan** di Kalimantan Selatan **mengalami penurunan 32,24% (yoy)** dibandingkan Maret 2024, sementara secara bulanan mengalami penurunan **14,17% (mtm)**.

Penurunan surplus neraca perdagangan pada Maret 2025 secara bulanan disebabkan oleh penurunan nilai ekspor sementara nilai impor mengalami peningkatan. Penurunan nilai ekspor pada Maret disebabkan oleh penurunan volume ekspor Minyak Kelapa Sawit dan Batubara. Dari sisi impor mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya importasi minyak petroleum dan kapal/kendaraan air seperti kapal feri, kapal kargo, kapal tongkang.

Kinerja APBN

Regional Kalimantan Selatan

Realisasi APBN Regional Kalimantan Selatan s.d. 31 Maret 2025

Pendapatan Negara Melemah 44,72% (y-on-y)

Realisasi APBN Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Maret 2025 mencatatkan Pendapatan Negara sebesar **Rp2.052,30 miliar (9,32% dari target)**.

Capaian ini **turun 44,72% (y-on-y)** karena penerimaan perpajakan, secara akumulatif, masih terkontraksi. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya restitusi pajak yang semula Rp857,11 miliar pada Maret 2024 menjadi Rp2.124,22 miliar pada Maret 2025.

Komposisi Pendapatan Negara terdiri atas **77,71% Penerimaan Perpajakan (Rp1.594,76 miliar)** [Rp1.323,59 miliar Pajak Dalam Negeri dan Rp271,17 miliar Kepabeanan & Cukai], serta **22,29% PNB (Rp457,54 miliar)**.

Realisasi **Pajak Dalam Negeri** sebesar **6,50% dari target** (turun 57,77% y-on-y), yang didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas dan Pajak Lainnya.

Realisasi **Kepabeanan dan Cukai** mencapai **103,84% dari target** (naik 479,30% y-on-y). Perlu diketahui bahwa target penerimaan BC Kalimantan Selatan mengalami penurunan semula Rp563,98 miliar pada Tahun 2024, menjadi Rp261,14 miliar pada Tahun 2025 atau turun 53,70%.

Realisasi **PNBP dan Hibah** sebesar **32,81% dari target** (turun 13,90% y-on-y). Capaian ini berasal dari PNB BLU (30,42%) dan PNB Lainnya (69,58%).



Belanja Negara Tumbuh 3,10% (y-on-y)

Di sisi Belanja Negara mencatatkan realisasi sebesar **Rp8.537,60 miliar (22,57% dari pagu)**, dengan capaian **lebih tinggi 3,10% (y-on-y)**.

Peningkatan Belanja Negara merupakan kontribusi Transfer ke Daerah (TKD) yang naik 13,26% (y-on-y). Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat turun sebesar 26,98% (y-on-y).

Komposisi Belanja Negara terdiri dari **17,89% Belanja Pemerintah Pusat** (Rp1.527,23 miliar) dan **82,11% TKD** (Rp7.010,36 miliar).

Realisasi **Belanja Pemerintah Pusat** adalah **15,39% dari pagu** (turun 26,98% y-on-y). BPP didominasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Namun demikian, Belanja Barang dan Belanja Modal mengalami penurunan diakibatkan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Kinerja Penyaluran TKD Naik 13,26% (y-on-y)



Realisasi **TKD Rp7.010,36 miliar** atau sebesar **25,13% dari pagu (naik 13,26% y-on-y)**, terdiri atas Rp6.299,88 miliar Transfer ke Daerah dan Rp710,48 miliar Dana Desa.

Realisasi **TKD tertinggi** ada pada **Kabupaten Hulu Sungai Utara** yaitu **29,54%**.

Seluruh komponen TKD sudah memiliki realisasi penyaluran, kecuali Hibah.

DBH	Rp3.192,57 M	22,9%
DAU	Rp2.418,62 M	27,4%
DAK Fisik	Rp2,62 M	0,3%
DAK Non Fisik	Rp674,77 M	25,7%
Hibah	Rp0,00 M	0,0%
Insentif Fiskal	Rp1,30 M	6,2%
Dana Desa	Rp710,48 M	47,8%

Kinerja APBD

Regional Kalimantan Selatan

Realisasi APBD Regional Kalimantan Selatan s.d. 31 Maret 2025

Pendapatan Daerah Turun 14,82% (y-on-y)

Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Maret 2025 mencatatkan Pendapatan Daerah sebesar **Rp8.066,59 miliar (19,21% dari target)**. Capaian ini **melemah 14,82% (y-on-y)**.

Komposisi Pendapatan Daerah terdiri atas **20,72% Pendapatan Asli Daerah (Rp1.671,14 miliar)**, **77,45% Pendapatan Transfer (Rp6.247,79 miliar)**, dan **1,83% Lain-lain Pendapatan Daerah (Rp147,67 miliar)**.

Realisasi **Pendapatan Asli Daerah** sebesar **19,80% dari target** (turun 13,22% y-on-y), yang disumbang oleh Pajak Daerah Rp1.260,34 miliar, Retribusi Daerah Rp141,63 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp107,33 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah Rp161,84 miliar.

Penurunan PAD yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih perlu meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah seiring dengan implementasi UU HKPD.

Realisasi **Pendapatan Transfer** sebesar **18,98% dari target** (turun 17,01% y-on-y). Dominasi Pendapatan Transfer menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, realisasi **Lain-lain Pendapatan Daerah** adalah **22,95% dari target** (naik 820,79% y-on-y).

Belanja Daerah Turun 5,70% (y-on-y)

Belanja Daerah mencatatkan realisasi sebesar **Rp5.231,69 miliar (10,98% dari pagu)**, dengan capaian **lebih rendah 5,70% (y-on-y)**.

Penurunan Belanja Daerah merupakan kontribusi dari Belanja Modal yang turun 71,12% (y-on-y), penurunan Belanja Tidak Terduga sebesar 28,81% (y-on-y), dan penurunan Belanja Transfer sebesar 5,86% (y-on-y). Sementara itu, Belanja Operasi naik sebesar 5,35% (y-on-y).

Realisasi **Belanja Operasi** adalah sebesar **Rp3.698,92 miliar** atau **12,41% dari pagu** (naik 5,35% y-on-y).

Realisasi **Belanja Modal** adalah sebesar **Rp169,86 miliar** atau **1,45% dari pagu** (turun 71,12% y-on-y).

Realisasi **Belanja Transfer** adalah sebesar **Rp1.361,19 miliar** atau **25,08% dari pagu** (turun 5,86% y-on-y).

Realisasi **Belanja Tidak Terduga** adalah sebesar **Rp1,71 miliar** atau **0,23% dari pagu** (turun 28,81% y-on-y).



Kinerja Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)



Perkembangan Penyaluran KUR s.d. 31 Maret 2024 dan 2025 per Bulan



Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan s.d. **31 Maret 2025** terealisasi sebesar **Rp1,1 triliun kepada 19.187 debitur**. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024 dengan **growth sebesar -21,71%**. Plafon target penyaluran KUR tahun 2025 ditetapkan sebesar **Rp5,69 triliun**. Sampai dengan Maret 2025, capaian penyaluran KUR terhadap target mencapai **19,43%**. KUR disalurkan secara **Konvensional** sebesar **Rp1,06 triliun** (95,72%) dan **Syariah** sebesar **Rp47,41 M** (4,28%). Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-20 Nasional dan peringkat ke-3 se-Kalimantan untuk Persentase Realisasi Penyaluran KUR terhadap Target.

3 Kabupaten/Kota dengan Penyaluran KUR Tertinggi per Maret 2025



Kota Banjarmasin merupakan kota dengan penyaluran KUR tertinggi per Maret tahun 2025 dengan nominal sebesar **Rp220,36 miliar** yang disalurkan kepada **3.214 debitur**. Capaian tersebut menurun **33,14%** dibandingkan periode Maret 2024. Pada posisi kedua dan ketiga ditempati oleh **Kab. Tanah Bumbu** dan **Kab. Banjar** dengan nominal realisasi KUR masing-masing mencapai **Rp135,70 miliar** dan **Rp111,39 miliar**.

3 Bank/LKBB Penyalur dengan Penyaluran KUR Tertinggi per Maret 2025



Hingga Maret 2025, penyaluran KUR di Kalsel dilakukan oleh **10 bank dan 1 LKBB penyalur** dengan nominal penyaluran tertinggi oleh **Bank BRI** sebesar **Rp782,83 miliar** kepada **16.325 debitur**. Pada posisi kedua dan ketiga ditempati oleh **Bank Mandiri** dan **Bank Kalsel** yang masing-masing menyalurkan KUR sebesar **Rp170,23 miliar** dan **Rp59,94 miliar**.



Kinerja Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Jumlah Debitur **↓89,37% yoy**



395 Debitur

Jumlah Penyaluran **↓86,94% yoy**



Rp2,23 Miliar

Perbandingan Penyaluran UMi s.d. 31 Maret 2024 dan 2025 per Bulan



Penyaluran UMi di Kalimantan Selatan s.d. **31 Maret 2025** terealisasi sebesar **Rp2,23 miliar kepada 395 debitur**. Penyaluran UMi secara kumulatif mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024 dengan **persentase growth sebesar -86,94%**. UMi disalurkan secara **Konvensional** sebesar **Rp2,23 miliar** (100%). Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-11 Nasional dan peringkat ke-1 se-Kalimantan untuk Realisasi Penyaluran Pembiayaan UMi.

3 Kabupaten/Kota dengan Penyaluran UMi Tertinggi per Maret 2025

1



Kab. Tanah Laut
Rp572,22 juta
103 Debitur

2



Banjarmasin
Rp328 juta
39 Debitur

3



Banjar
Rp206,70 juta
35 Debitur

Kota Tanah Laut merupakan kabupaten dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi per 31 Maret 2025 dengan nominal sebesar **Rp572,22 juta yang disalurkan kepada 103 debitur**. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar **52,76%** dibandingkan tahun lalu. Pada posisi kedua penyaluran pembiayaan UMi oleh **Kota Banjarmasin sebesar Rp328 juta ke 39 debitur** dan posisi ketiga oleh **Kab. Banjar sebesar Rp206,70 juta ke 35 debitur**.

3 LKBB Penyalur dengan Penyaluran UMi Tertinggi per Maret 2025

1



BAV
Rp1,50 miliar
339 Debitur

2



Pegadaian
Rp617,72 juta
50 Debitur

3



KJP CPS
Rp120 juta
6 Debitur

BAV merupakan LKBB dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi per 31 Maret 2025 dengan nominal penyaluran sebesar **Rp1,50 miliar kepada 339 debitur**. Sementara pada posisi kedua adalah **Pegadaian** yang menyalurkan pembiayaan UMi sebesar **Rp617,72 juta kepada 50 debitur**. Pada posisi ketiga penyaluran pembiayaan UMi oleh **KJP CPS sebesar Rp120 juta kepada 6 debitur**.

Local Issue

Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Selatan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Program ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mengatasi tantangan gizi buruk dan *Stunting* di Indonesia sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi.

Kota Banjarmasin

- Program MBG dilaksanakan di 14 sekolah di Banjarmasin, mulai dari TK hingga SMA/SMK.
- Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025.
- Dapur umum dikelola oleh Korem dan Kodim Kota Banjarmasin.
- Petugasnya telah mendapatkan pelatihan dari Badan Gizi Nasional dan Akademi Militer.



Kab Tanah Bumbu

- Program MBG diluncurkan pada 13 Januari 2024 di Sekolah Bangun Banua.
- Program ini melibatkan vendor dari Provinsi Jawa Tengah dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
- Dapur yang dikelola oleh Kodim 1022/Tanah Bumbu memiliki kapasitas 3.000–3.500 porsi / hari.



Kab Banjar

- Program MBG dilaksanakan di enam sekolah, di antaranya RA Arrahman, SD Keraton 5, MIN 16 Banjar, MIS Nur Rahman, dan MTs Nur Rahman.
- Pemberian MBG dilanjutkan selama Bulan Ramadhan tetapi diganti dalam bentuk takjil.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

- Pemprov Kalsel mendukung program MBG dengan menyalurkan bibit tanaman hortikultura ke kabupaten/kota.
- Pemprov Kalsel mengimbau kepada pelaku catering agar tidak terkecoh dengan iming-iming oknum yang bisa menjadikan sebagai penyedia program MBG.

Penanggung Jawab Program MBG di Kalimantan Selatan

- Di Banjarmasin, Kodim kota setempat ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan program MBG.
- Di Tanah Bumbu, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional mendanai program MBG.

Target Penyaluran Program MBG di Kalimantan Selatan

- Total **target penerima MBG** terkini di Kalsel adalah sebanyak **963.320**.
- Sampai dengan saat ini, di Kalsel terdapat **11 SPPG dengan 20.524 penerima**.
- Apabila 1 SPPG akan menyalurkan MBG kepada 3.000 penerima, maka **masih dibutuhkan kurang lebih 304 SPPG/Dapur tambahan** di Kalsel.

Opini

Penanggulangan Sampah Melalui Kebijakan Fiskal



Oleh:

Chandra Julihandono Sj
 Analis Perbendaharaan Negara
 Kanwil DJPb Kalsel

Sampah, sampah, dan sampah. Itulah pandangan mata dalam keseharian masyarakat di kota Banjarmasin. Hampir dari kita semua yang tinggal di kota ini, setiap melintas melalui jalanan sewaktu bepergian selalu melihat tumpukan sampah yang meluber di beberapa sudut kota, sungai atau di seluruh Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada.



SAMPAH MELUBER - Tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) eks Pasar Buah meluber hingga menutupi setengah badan Jalan Veteran, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (13/3).



DIPENUHI SAMPAH - Sampah menutupi Sungai Veteran karena aliran sungai tertahan jembatan yang runtuh di samping Pasar Batuah, Jalan Veteran, Banjarmasin, Rabu (19/3).

Sumber berita: Banjarmasin Post, edisi Maret 2025

Sungguh permasalahan klasik yang selalu ada hampir di seluruh kota-kota besar Indonesia. Sesuatu hal yang sepertinya harus terjadi dan abadi adanya. Miris memang jika kita mengetahui bahwa kesadaran penduduk Indonesia akan kebersihan dan kelestarian lingkungan masih sangat kurang. Apalagi budaya atau pola pikir masyarakat yang cenderung beranggapan bahwa sampah adalah tanggung jawab instansi terkait pada pemerintah atau pemerintah daerah. Padahal kalau kita pikir kembali, sampah itu berasal dari dan oleh kita, tentu akan menuju ke kita lagi jika tidak diatasi dengan bijak. Sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan terkait, namun juga seluruh elemen masyarakat yang ada, atau dapat dikatakan adalah tanggung jawab kita semua.

Jika kita biarkan sampah terlalu lama menumpuk, maka tidak hanya bau menyengat yang selalu menusuk hidung, namun juga sangat berisiko bagi kesehatan. Puncak dari masalah sampah di kota Banjarmasin terjadi ketika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Basirih ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak 1 Februari 2025. Hal itu menjadikan timbunan sampah semakin banyak di berbagai titik.

Tumpukan sampah membuat pemandangan kota menjadi kotor dan tidak nyaman. Ditambah lagi jadwal pengangkutan sampah masih sangat terbatas. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah bau tak sedap yang menyebar sangat mengganggu kesehatan dan risiko penyakit meningkat akibat pencemaran lingkungan dari sampah. Hal inilah menjadikan kota Banjarmasin dalam kondisi darurat sampah.

Namun saat ini dengan kepemimpinan pemerintahan di bawah Walikota dan Wakil Walikota yang baru, Banjarmasin mulai bergerak secara masif dan terus-menerus dengan kebijakan yang tegas dan ketat mengatasi permasalahan sampah tersebut. Bagi masyarakat yang melanggar akan terancam denda hingga Rp5 juta dan ancaman pidana kurungan badan.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan, Pemko Banjarmasin tidak akan mengangkut sampah dari warga yang tidak melakukan pemilahan sebelum membuang sampah. Pemko Banjarmasin berharap dengan regulasi tersebut warga terdorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.

Selain itu, Pemko juga gencar melaksanakan sosialisasi dan edukasi hingga tingkat RT, sekolah, dan komunitas untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya memilah dan mengelola sampah sejak dini. Sehingga dapat menjadi momentum perubahan budaya bersih di kota Banjarmasin dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menjaga kota tetap bersih, asri, dan sehat.

Tidak hanya Pemko Banjarmasin saja yang *concern* terhadap permasalahan sampah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru (Muhidin dan Hasnuryadi), juga menegaskan bahwa persoalan darurat sampah di Kota Banjarmasin menjadi prioritas utama di awal pemerintahannya.

Tidak hanya menerbitkan dan melaksanakan peraturan saja sebagai upaya untuk mengurangi dan mengatasi masalah sampah, penting juga harus didukung dengan pembiayaan dalam melaksanakan berbagai ketentuan tersebut. Strategi kebijakan yang tepat dengan dukungan finansial yang memadai akan menanggulangi sampah secara komprehensif.

Pemkot Banjarmasin sudah membangun TPS3R (*reduce, reuse, recycle*) di setiap kelurahan, pembentukan Satgas penanganan sampah, dan penutupan TPS-TPS ilegal namun semua itu belum cukup.

Keterbatasan waktu, tenaga, dan terutama biaya menjadi tantangan tersendiri yang cukup kompleks. Tanpa anggaran, maka berbagai program penanganan sampah menjadi tidak optimal dan bisa jadi menimbulkan permasalahan baru.

Penerapan teknologi pengelolaan sampah sangat diperlukan agar sampah bisa ditanggulangi secara optimal dan bermanfaat. Oleh karena itu diperlukan dukungan kebijakan fiskal yang tepat untuk melaksanakannya. Satu hal yang dapat diterapkan Pemko Banjarmasin adalah percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah yang dapat menghasilkan energi listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan.

Kementerian Keuangan, dalam hal ini kita di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, dapat ikut berpartisipasi dalam dukungan fiskal tersebut. Kanwil DJPb dapat melakukan sosialisasi atau *focus group discussion* (FGD) terkait dukungan pembiayaan penanganan sampah, dan koordinasi pembiayaan pembangunan PSEL menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pinjaman daerah. Selain itu, pemberian dukungan terkait penyaluran dan penggunaan alokasi Dana Non Fisik berupa Dana Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS) termasuk melakukan monitoring dan evaluasi (*monev*) atas capaian penggunaan dana tersebut juga penting.

Investasi dalam penanganan sampah bukan hanya soal kesehatan, namun menjadi strategi ekonomi yang tepat. Dengan pengolahan sampah yang tepat, daerah dapat menumbuhkan sumber ekonomi baru, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.



Lensa Peristiwa Penting



10 Januari 2025

Rapat Pembahasan Isu Strategis
Provinsi Kalimantan Selatan

15 Januari 2025

Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Kalimantan Selatan



20 Januari 2025

Outlook Ekonomi Kalsel 2025
"Potensi dan Tantangan Ekonomi
Kalsel Tahun 2025"



24 Januari 2025

Townhall Meeting
Ditjen Perbendaharaan





Lensa

Peristiwa Penting



4 Februari 2025

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan

7 Februari 2025

Seminar Nasional Transformasi Publikasi Media



13 Februari 2025

Rapat Koordinasi dan Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan



24 Februari 2025

Stakeholder Engagement Sosialisasi Meterisasi PJU P33 dan Coklit PBJT TL Semester II Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan





Lensa Peristiwa Penting



6 Maret 2025

Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan Tahun 2024

7 Maret 2025

Pengukuhan Serentak TPAKD di Provinsi Kalimantan Selatan



12 Maret 2025

Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2024



20 Maret 2025

Kuliah Tamu Prodi S-1 Manajemen FEB Universitas Lambung Mangkurat



Kanwil DJPb Kalsel
"Bergerak Bersama Untuk Menjadi Yang Terbaik"



Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. D.I. Panjaitan No. 24, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114